

BAB 5

KESIMPULAN

Demi meningkatkan proses antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* di Belanda, pada tahun 1998 pemerintah Belanda mengeluarkan aturan integrasi yang bernama *Wet Inburgering Nieuwkomers* agar tercipta perkembangan integrasi kaum minoritas dan pemberdayaan pendatang baru. *Wet Inburgering Nieuwkomers* tersebut dinilai tidak berhasil meningkatkan proses integrasi tersebut. Hal ini bisa dilihat dari ketidakharmonisan hubungan antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* yang disebabkan oleh ideologi yang bertentangan dari kedua belah pihak.

Konflik-konflik antara *Allochtonen* dengan *Autochtonen* yang berbeda ideologi tersebut relevan dengan pendapat Samuel Huntington yang menyatakan bahwa salah satu penyebab terjadinya konflik akibat benturan antara dua peradaban diakibatkan karena karakteristik dan perbedaan budaya kurang bisa menyatu. Pendapat Huntington tersebut juga serupa dengan pendapat milik Maswadi Rauf yang berpendapat bahwa identitas primordialisme baik itu agama, suku, ras dan lain-lain akan menjadi penyebab konflik apabila identitas tersebut telah disinggung oleh seseorang atau kelompok tertentu.

Akibat kegagalan tersebut maka *Wet Inburgering Nieuwkomers* telah dievaluasi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2004 dan 2007. Selain mengevaluasi kebijakan imigrasinya pada tahun 2007, Pemerintah Belanda juga giat dalam memberikan perhatian terhadap kaum minoritas untuk menolong negeri Belanda dari kehancuran akibat tidak berjalannya proses integrasi di negara tersebut. Will Kymlicka berpendapat bahwa sebuah negara multikultural harus bisa menjamin hak-hak dari kaum minoritas. Hak-hak yang dimaksud adalah: hak untuk memimpin diri sendiri atau kelompok sendiri, hak untuk berorganisasi seperti pendirian Mesjid, sekolah atau organisasi lainnya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum dan finansial dan hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Dari analisa yang dilakukan oleh *Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling* (FORUM) pada tahun 2008. Kebijakan *Wet Inburgering Nieuwkomers* yang dikeluarkan pada tahun 2007 tersenut berhasil meningkatkan proses integrasi kaum imigran muslim di Belanda yang mengaku bahwa mereka telah berhasil untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup masyarakat Belanda dan tidak lagi mendapat perlakuan diskriminasi.

Permasalahan kembali muncul ketika seorang politisi ekstrim kanan Belanda, Geert Wilders membuat sebuah film pendek yang diberi judul *Fitna* pada tanggal 2 maret tahun 2008. Film tersebut mendapatkan kecaman dari umat muslim di Belanda dan di negara-negara lainnya karena film tersebut menghina umat muslim. Tindakan yang dilakukan Geert Wilders tersebut ternyata banyak mendapatkan dukungan dari anggota dewan Belanda dari golongan kanan yang anti-Islam dan dukungan terhadap Wilders juga muncul di sejumlah website.

Dengan kemenangan yang diraih oleh PVV yang dipimpin oleh Wilders pada tanggal 9 Juni kemarin membuat peluang Wilders untuk berkoalisi dalam pemerintahan yang baru di Belanda. Penulis berpendapat apabila Wilders benar-benar berhasil masuk ke dalam pemerintahan yang baru, maka kaum minoritas terutama mereka yang memiliki identitas sebagai pemeluk Islam akan semakin tertindas karena Wilders sendiri merupakan politisi yang terkenal sangat anti terhadap Islam dan menganggap bahwa Islam bisa menghancurkan negeri Belanda dengan ideologi-ideologi yang terkandung didalamnya

Penulis juga berpendapat bahwa masalah integrasi yang terjadi di Belanda pada tahun 2008 bukan lagi disebabkan oleh masyarakat muslim yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan gaya hidup masyarakat mayoritas di Belanda tetapi karena cara pandang masyarakat mayoritas di Belanda yang masih menganggap bahwa Islam identik dengan terorisme dan tidak sejajar dengan ideologi liberalisme. Jika pandangan buruk terhadap Islam tersebut tidak segera dihilangkan, maka proses integrasi di Belanda akan terus menghadapi masalah.